

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya, pembangunan dapat dimaknai sebagai usaha atau proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya, pembangunan memiliki berbagai masalah seperti ketimpangan distribusi pendapatan, kemiskinan, pengangguran, inflasi, dan sebagainya. Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, baik aspek ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas hidupnya, untuk itu peran *pemerintah* dan masyarakat sangat dibutuhkan.

Tujuan pembangunan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa sehingga setiap tahap semakin mendekati tujuan. Hidup layak merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal. Pembangunan manusia secara fisik dan mental mengandung makna sebagai peningkatan kemampuan dasar penduduk. Kemampuan dasar penduduk tersebut diperlukan untuk memperbesar kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Peningkatan kemampuan dasar dapat pula dilakukan melalui peningkatan derajat kesehatan, pengetahuan dan keterampilan penduduk. Hal tersebut penting karena dapat dilihat dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial budaya, dan politik. Dalam *Indonesia Human Development*

Report 2004 disebutkan bahwa perkembangan pembangunan manusia di Indonesia selama ini sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi dari awal 1970-an sampai akhir 1990-an. Pertumbuhan tersebut memungkinkan penduduk untuk mengalokasikan pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan lebih banyak. Sementara pengeluaran pemerintah untuk pelayanan seperti kesehatan dan pendidikan relatif masih sedikit.

Dalam kawasan Asia, terdapat ASEAN (*Association of South East Asia Nation*) yang menganut keterbukaan ekonomi demi memacu pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN yang kemudian berkembang menjadi AFTA (*Asean Free Trade Area*) yang merupakan salah satu FTA regional. ASEAN dibentuk pada tahun 1967 dimana pada saat itu beranggotakan 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand. Kemudian pada tahun 1984 anggota ASEAN bertambah dengan masuknya Brunai Darussalam. Pada tahun 1995, Vietnam pun masuk menjadi anggota yang disusul tahun 1997 Laos dan Myanmar masuk menjadi anggota. Terakhir pada tahun 1998 anggota ASEAN bertambah menjadi 10 negara dengan bergabungnya Kamboja menjadi anggota ASEAN. Tujuan diadakannya AFTA adalah negara–negara di ASEAN bebas melakukan perdagangan tanpa adanya hambatan, Pada era krisis global yang tengah melanda dunia terutama di Amerika dan Eropa, para Kepala Negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-9 di Bali menyetujui untuk membentuk komunitas ASEAN dalam bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Keamanan Politik yang dikenal dengan *Bali Concord II*. Dengan terbentuknya *ASEAN Economic Community* (AEC) sendiri

direncanakan akan tercapai pada tahun 2015. AEC adalah bentuk dari kerjasama perdagangan dan ekonomi ASEAN dimana untuk mewujudkan AEC tersebut, para pemimpin negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura menyepakati *AEC Blueprint* sebagai acuan seluruh negara anggota dalam mengimplementasikan komitmen AEC. Sehingga diharapkan pada tahun 2015, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta arus modal yang lebih bebas diantara negara-negara anggota ASEAN. AEC atau masyarakat ekonomi ASEAN dibentuk dengan tujuan dalam rangka menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN, meningkatkan daya saing di pasar dunia, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup penduduk negara anggota ASEAN.

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP), IPM diukur dengan menggunakan 3 dimensi, yaitu pemenuhan pendidikan, pemenuhan kesehatan, dan daya beli. Pendapatan per kapita merupakan salah satu komponen dalam menentukan IPM yang menunjukkan daya beli masyarakat. Jika pendapatan per kapita masyarakat tinggi, maka daya beli masyarakat juga tinggi. Tingginya daya beli masyarakat apakah mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan kesehatan.¹

¹ *United Nations Development Programme* (UNDP) Annual Report 2012, hlm. 4.

Tabel 1.1
Bidang, Dimensi, dan Indikator IPM

Bidang	Dimensi	Indikator
Pendidikan	Pengetahuan/ terdidik	Angka melek huruf orang dewasa dan partisipasi sekolah dari penduduk perempuan dan laki-laki
Kesehatan	Panjang umur dan hidup sehat	Usia harapan hidup dari penduduk perempuan dan laki-laki
Ekonomi	Standart hidup layak	Daya beli perempuan dan laki-laki

Sumber: Laporan Pembangunan Manusia Indonesia, 2001

Adanya peringkat pertumbuhan ekonomi GNP/GDP yang muncul pada tahun 60-an, mewarnai pemikiran dalam mengukur keberhasilan pembangunan. GDP/GNP memang merupakan ukuran makro ekonomi yang masih dipakai oleh banyak negara, meskipun ukuran tersebut belum menggambarkan sebenarnya, terutama gambaran kualitas manusianya. Konsep pembangunan manusia sendiri menempatkan manusia sebagai pusat dari serangkaian proses pembangunan ekonomi dengan penekanan pada perluasan pilihan dan peningkatan kemampuan manusia

Berdasarkan kajian aspek status pembangunan manusia, tinggi rendahnya status pembangunan manusia menurut UNDP dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

- a. Tingkatan rendah jika IPM $0,200 - < 0,350$

b. Tingkatan menengah jika IPM 0,450 – 0,799

c. Tingkatan tinggi jika IPM > 0,800

Adapun 10 besar indeks pembangunan manusia di dunia adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
10 Indeks pembangunan manusia tertinggi di dunia tahun 2012

No.	Negara	IPM
1	Norwegia	0,942
2	Australia	0,932
3	Switzerland	0,927
4	Denmark	0,921
5	Netherlands	0,920
6	Germany	0,915
7	Irland	0,912
8	United States	0,910
9	Canada	0,910
10	New Zeland	0,909

Sumber : Annual Report UNDP 2012

Berdasarkan tabel di atas indeks pembangunan manusia tertinggi di dunia adalah Norwegia yaitu sebesar 0,942. Australia adalah peringkat kedua yang memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi khusus untuk negara maju yaitu sebesar 0,932. Tingginya angka IPM di Australia karena dia memiliki beberapa peringkat tertinggi di dunia dalam kategori kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, di mana hampir 100% penduduknya melek huruf dan persentase sangat tinggi dari

lulusan pendaftaran dan kuliah. Angka Harapan hidupnya mencapai 81 tahun sangat jauh dibanding angka harapan hidup indonesia yang hanya sebesar 67 tahun.²

Berdasarkan data pada table 1.2 diatas negara di Asia tenggara bahkan tidak masuk kedalam 10 besar indeks pembangunan manusia tertinggi di dunia. Berikut ini data indeks pembangunan manusia di kawasan asean pada tahun 2012:

Tabel 1.3
Indeks Pembangunan Manusia di ASEAN tahun 2012

No	Negara	IPM
1	Singapura	0,905
2	Brunei Darusalam	0,852
3	Malaysia	0,744
4	Thailand	0,723
5	Indonesia	0,678
6	Vietnam	0,660
7	Philippines	0,567
8	Laos	0,562
9	Kamboja	0,546
10	Myanmar	0,528

Sumber : Laporan UNDP tahun 2012 (data diolah oleh peneliti)

Pada tahun 2012, Di beberapa Negara berkembang seperti Thailand mempunyai indeks pembangunan manusia lebih tinggi dibanding Indonesia.

² World Bank Data, www.data.worldbank.org/world-human-development, (diakses pada tanggal 1 Desember 2015 pukul 08.30).

Thailand memiliki indeks pembangunan manusia sebesar 0,723, dan harus diakui dalam IPM tahun 2012 ini peringkat Thailand lebih baik daripada Indonesia. Thailand menduduki urutan ke-97 atau 11 peringkat di atas Indonesia. Perkembangan Thailand cukup baik karena investasinya dibidang pendidikan. Sementara dari sisi pendapatan Thailand sedikit lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Vietnam dan Myanmar adalah Negara yang memiliki IPM lebih rendah dibanding Indonesia. Vietnam memiliki indeks pembangunan manusia sebesar 0,660. Ini berarti bahwa Vietnam memiliki angka IPM dibawah angka IPM Indonesia. Karena sejak tahun 2006 indeks pendidikan Indonesia lebih tinggi dari pada Vietnam yaitu sebesar 0,83 untuk Indonesia dan 0,82 untuk Vietnam.

Indeks daya beli di Indonesia juga lebih tinggi dari pada Vietnam yaitu 0,61 bagi Indonesia dan 0,57 pada Vietnam. Akan tetapi angka harapan hidup Vietnam lebih besar dari pada Indonesia yaitu 0,81 di Vietnam dan 0,75 di Indonesia. Myanmar memiliki indeks pembangunan manusia sebesar 0,528. Angka ini berada di bawah angka IPM Indonesia dan merupakan nilai IPM terendah diantara 10 negara Asean. Hal ini disebabkan karena angka melek huruf Indonesia lebih tinggi dibanding Myanmar, yaitu 92,3% di Indonesia dan 92 % di Myanmar. Di sisi lain Myanmar menempati urutan kedua dari penduduknya yang tidak memiliki akses air bersih dibanding Indonesia yang menempati urutan ke empat. Tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih berdampak pada rendahnya derajat kesehatan di Negara Myanmar. Selain itu angka kekurangan berat badan di

Myanmar lebih tinggi di banding Indonesia yaitu mencapai 29% untuk Myanmar dan 27% di Indonesia.³

Indeks pembangunan manusia yang terjadi di negara–negara di Asia Tenggara salah satunya juga di pengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Pemerintah dalam upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia dibantu dengan alokasi pengeluaran pemerintah di sektor publik seperti pendidikan dan kesehatan.

Dewasa ini negara-negara berkembang makin meningkatkan perhatiannya pada bidang pendidikan dibanding selama era tahun 1980. Hal ini cukup beralasan karena masyarakat dengan tingkat pendidikan yang baik maka akan memberikan kontribusi yang besar terhadap proses pembangunan. Namun demikian, persentase pengeluaran publik untuk bidang pendidikan negara-negara berkembang tetap masih lebih kecil dibandingkan negara maju.

Dengan anggaran sektor pendidikan yang sedemikian rupa seperti tidak sejalan dengan salah satu sasaran dari *Millennium Development Goals* mengenai bidang pendidikan. Dalam teori pertumbuhan Solow, suatu negara dapat meningkatkan outputnya dengan adanya akumulasi kapital yang dihasilkan dari adanya investasi. Menurut teori pertumbuhan endogen yang merupakan kritik terhadap teori pertumbuhan Solow, faktor endogen merupakan faktor yang penting dalam peningkatan output dari suatu negara atau dengan kata lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Faktor endogen yang dimaksud dalam teori pertumbuhan endogen adalah faktor yang berasal dari dalam perekonomian itu sendiri, misalnya kemajuan teknologi dan pendidikan.

³ UNDP Annual Report, *op. cit*, hlm. 226.

Pendidikan dalam hal ini akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dalam suatu perekonomian. Berikut data pengeluaran pemerintah bidang pendidikan di 10 negara Asean

Tabel 1.4
Persentase Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan
dari Total Pengeluaran Pemerintah di ASEAN tahun
2012 (dalam persen)

No.	Negara	Persentase terhadap pengeluaran pemerintah total
1.	Singapura	20,9
2.	Indonesia	18,01
3.	Malaysia	21,01
4.	Thailand	20,7
5.	Vietnam	21,4
6.	Laos	15,4
7.	Kamboja	16,2
8.	Brunei Darusalam	9,7
9.	Philippina	17,0
10.	Myanmar	Unpublished

Sumber : World Bank Data (Data Diolah)

Dari tabel pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan, dapat terlihat bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan sudah cukup baik apabila dibandingkan dengan pengeluaran total dari belanja pemerintah. Seperti yang terlihat, di negara-negara Asean, Malaysia adalah negara yang paling besar mengalokasikan pengeluaran pemerintahnya dibidang pendidikan apabila dibandingkan dengan negara Asean lain. Selanjutnya diikuti oleh Singapura dan Thailand.

Sumber daya manusia dianggap penting dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sehingga pendidikan yang merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia juga menjadi penting. Selain pendidikan, kesehatan juga merupakan

salah satu kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi guna mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang baik.

Tabel 1.5
Persentase Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan
dari Total Pengeluaran Pemerintah di ASEAN tahun
2012 (dalam persen)

No.	Negara	Persentase terhadap pengeluaran pemerintah total
1.	Singapura	11,1
2.	Indonesia	6,6
3.	Malaysia	5,7
4.	Thailand	16,9
5.	Vietnam	9,3
6.	Laos	2,6
7.	Kamboja	6,7
8.	Brunei Darusalam	6,0
9.	Philippina	8,0
10.	Myanmar	1,5

Sumber : World Bank Data (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat bahwa Thailand adalah negara di Asean dengan pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan yang terbesar dengan dibandingkan negara lain. Pengeluaran kesehatan di negara-negara Asean ini masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan pengeluaran untuk bidang pendidikan. Padahal, selain pendidikan kesehatan juga sangat berpengaruh penting untuk meningkatkan pertumbuhan indeks pembangunan manusia karena dengan kesehatan yang baik maka masyarakat dapat memiliki kemampuan untuk mengenyam pendidikan yang baik yang nantinya akan mempengaruhi tingkat produktivitas manusia itu sendiri.

Dengan alokasi dana tersebut, pemerintah dapat mengupayakan peningkatan produktivitas sehingga dapat membantu peningkatan pembangunan manusia. Akan tetapi, pada kenyataannya seringkali terjadi ketimpangan antara pengeluaran pemerintah di sektor publik yaitu pendidikan dan kesehatan dengan pengeluaran pemerintah dibidang infrastruktur (fisik). Pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur memang dibutuhkan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang dapat menjadi investasi pemerintah, akan tetapi pengeluaran pemerintah dalam rancangan untuk peningkatan sumber daya manusia juga sangat diperlukan yang mana juga dapat dijadikan suatu investasi. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan secara positif mempengaruhi peningkatan pembangunan manusia (IPM). Artinya jika pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan dan kesehatan di perbesar, maka peningkatan untuk pembiayaan kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana, pendidikan dan kesehatan menjadi lebih baik dan menguntungkan masyarakat.

Selain pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu hal yang cukup mempengaruhi peningkatan indeks pembangunan manusia. Sesuai dengan perkembangan pandangan pembangunan ekonomi, maka telah terjadi perubahan tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi dari pendekatan pertumbuhan ekonomi (*growth*) menjadi pendekatan pembangunan manusia. Untuk mempermudah pencapaian usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan indikator tentang kesejahteraan masyarakat. Banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, akan tetapi pertumbuhan ekonomi menjadi suatu indikator yang sering menjadi pokok sasaran

pembangunan. Karena, pertumbuhan ekonomi akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Kenaikan pendapatan per kapita akan meningkatkan kemampuan (daya beli) masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Wilayah Asean merupakan wilayah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup menengah. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi di asean tahun 2012 :

Tabel 1.6
Persentase Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN tahun
2012 (dalam persen)

No.	Negara	Persentase pertumbuhan ekonomi berdasarkan GDP tahun 2011	Persentase pertumbuhan ekonomi berdasarkan GDP tahun 2012
1.	Singapura	6,2	3,4
2.	Indonesia	6,2	6,0
3.	Malaysia	5,2	5,5
4.	Thailand	0,1	7,3
5.	Vietnam	6,2	5,2
6.	Laos	8,0	8,0
7.	Kamboja	7,1	7,3
8.	Brunei Darusalam	1,0	0,9
9.	Philippina	3,7	6,7
10.	Myanmar	9,6	5,5

Sumber : World Bank Data (Data Diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi negara – negara di ASEAN berfluktuasi dimana pada pertengahan dari tahun 2011-2012 yaitu di tahun 2012 pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi adalah negara Laos yaitu sebesar 8,0 persen. Akan tetapi, apabila dibandingkan dari tahun sebelumnya yang menunjukkan angka 8,0 pula, maka dapat terlihat pada kurun waktu 2011-2012 tidak terjadi pertumbuhan ekonomi sama sekali. Negara kedua dengan

pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Thailand. Pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi hanya berkisar pada 0,1 persen sedangkan pada tahun berikutnya terjadi perubahan yang cukup drastis yaitu sebesar 7,3 persen. Pertumbuhan ekonomi ini dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor eksternal dan internal. Dari faktor eksternal, perlambatan itu dipengaruhi turunnya ekspor akibat turunnya permintaan dan harga komoditas global. Faktor lainnya yang merupakan faktor domestik adalah program penghematan anggaran yang menyebabkan terbatasnya konsumsi pemerintah.

Tabel 1.7
PDB Indonesia

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
PDB (dalam milyar USD)	364.6	332.2	510.2	539.6	755.1	893.0	917.9	910.5	888.5
PDB (perubahan % tahunan)	5.5	6.3	6.0	4.6	6.2	6.2	6.0	5.6	5.0
PDB per Kapita (dalam USD)	1,590	1,861	2,168	2,263	3,125	3,648	3,701	3,624	3,492

Tampak dalam tabel di atas bahwa penurunan perekonomian global yang disebabkan oleh krisis finansial global di akhir 2000-an memiliki dampak yang relatif kecil pada perekonomian Indonesia dibandingkan dengan dampak yang dialami negara-negara lain. Pada tahun 2009, pertumbuhan PDB Indonesia turun menjadi 4,6%, yang berarti bahwa performa pertumbuhan PDB negara ini merupakan salah satu yang terbaik di seluruh dunia (dan memiliki peringkat

tertinggi ketiga di antara negara-negara dengan perekonomian besar yang tergabung di dalam grup G-20.

Meskipun terjadi penurunan tajam harga-harga komoditi, turunnya pasar saham, yield obligasi domestik dan internasional yang lebih tinggi, dan melemahnya nilai tukar rupiah, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh dengan layak. Kesuksesan ini terutama disebabkan oleh pengaruh ekspor Indonesia yang relatif terbatas terhadap perekonomian nasional, terjaganya kepercayaan pasar yang tinggi, dan berlanjutnya konsumsi domestik yang subur. Konsumsi domestik di Indonesia (terutama konsumsi pribadi) berkontribusi untuk sekitar 55% dari total pertumbuhan ekonomi negara ini.

Pada tahun 2010, Bank Dunia melaporkan bahwa karena suburnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, setiap tahunnya sekitar 7 juta penduduk Indonesia masuk dalam kelas menengah negara ini. Di 2012, jumlah penduduk kelas menengah Indonesia mencapai sekitar 75 juta orang (dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 240 juta orang) dan perusahaan penelitian seperti Boston Consulting Group (BCG) dan McKinsey menyatakan bahwa kelompok kelas menengah ini akan bertambah kira-kira dua kali lipat pada tahun 2020-2030. Meskipun pertumbuhan penduduk kelas menengah telah berkurang karena perlambatan perekonomian negara ini yang terjadi setelah 2011, Indonesia memiliki kekuatan konsumen yang mendorong perekonomian dan telah secara signifikan memicu pertumbuhan investasi domestik dan asing sejak 2010.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, terlihat beberapa masalah yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia antara lain seperti :

1. Adanya pengaruh antara pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan terhadap tingkat pembangunan manusia di ASEAN
2. Adanya pengaruh antara pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap tingkat pembangunan manusia di ASEAN
3. Adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi negara terhadap tingkat pembangunan manusia di ASEAN
4. Adanya pengaruh antara kemiskinan terhadap tingkat pembangunan manusia
5. Adanya pengaruh antara Investasi luar Negeri terhadap tingkat pembangunan manusia di ASEAN

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, terlihat bahwa tingkat pembangunan manusia dipengaruhi oleh faktor yang cukup beragam. Oleh karena itu, peneliti membatasi penelitian ini hanya pada masalah “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dibidang Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di ASEAN”

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia ?
2. Apakah terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia?
3. Apakah terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia?

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan menambah informasi, serta ilmu tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat pembangunan manusia khususnya mengenai pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan serta pertumbuhan ekonomi .

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan, masukan serta referensi bagi peneliti selanjutnya, serta dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi UNJ, fakultas Ekonomi dan untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk pemecahan masalah dibidang pembangunan manusia.